



Strategi Pemerintah Filipina dalam Menekan Peningkatan Kasus *Online Sexual Abuse Exploitation of Children (OSAEC)* pada Tahun 2020-2023

Dina Laksita Hapsari^{1*}, Novriest Uumbu Walangara Nau¹, Roberto Octavianus Cornelis Seba¹

¹Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Komunikasi, Universitas Kristen Satya Wacana, Indonesia

*Korespondensi: dinalaksita48@gmail.com

Info Artikel

Diterima 20
April 2024

Disetujui 26
Mei 2024

Dipublikasikan 30
Mei 2024

Keywords:
OSAEC, Filipina,
Pemerintah, Kerja
Sama, HAM

© 2024 The
Author(s): This is
an open-access
article distributed
under the terms of
the Creative
Commons
Attribution
ShareAlike (CC BY-
SA 4.0)



Abstrak

Isu pelanggaran HAM merupakan permasalahan global kontemporer yang hingga kini masih menjadi bahan diskusi dalam forum hubungan internasional. Perkembangan teknologi yang semakin canggih menghadirkan jenis dan motif baru bagi pelaku kejahatan. OSAEC merupakan salah satu pengaruh negatif dari era digitalisasi. Pendekatan yang digunakan adalah kualitatif deskriptif. Analisis data kualitatif merupakan suatu proses untuk mencari dan menyusun secara sistematis data dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan. Data yang akan diambil yaitu tentang strategi pemerintah Filipina dalam menekan peningkatan kasus Online Sexual Abuse Exploitation of Children (OSAEC) pada tahun 2020-2023 serta faktor-faktor pendukung dan faktor-faktor penghambat dalam melaksanakan strategi tersebut. Penelitian ini menggunakan teori neoliberalisme dengan didukung konsep-konsep yang relevan. Penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah Filipina telah menandatangani the Implementing Rules and Regulations of Republic Act 11930. Namun, masih ditemukan beragam tantangan dalam implementasinya. Oleh sebab itu, dibutuhkan kemitraan antara pemerintah dengan berbagai pihak yang dapat mendukung penanganan kasus OSAEC.

Abstract

The issue of human rights violations is a contemporary global problem which is still a topic of discussion in international relations forums. The development of increasingly sophisticated technology presents new types and motives for criminals. OSAEC is one of the negative influences of the digitalization era. The approach used is descriptive qualitative. Qualitative data analysis is a process for systematically searching and compiling data by organizing data into categories, describing it into units, synthesizing it, arranging it into patterns, selecting what is important and what will be studied, and making conclusions. The data that will be taken is about the Philippine government's strategy in suppressing the increase in Online Sexual Abuse Exploitation of Children (OSAEC) cases in 2020-2023 as well as supporting and inhibiting factors in implementing this strategy. This research uses neoliberalism theory supported by relevant concepts. Research shows that the Philippine Government has signed the Implementing Rules and Regulations of Republic Act 11930. However,

various challenges are still found in its implementation. Therefore, a partnership is needed between the government and various parties who can support handling OSAEC cases.

1. Pendahuluan

Seiring perkembangan globalisasi, dinamika studi Hubungan Internasional mengalami perluasan isu yang diperdebatkan dalam forum diskusi. Salah satu isu kontemporer yang selalu hangat diperbincangkan adalah isu kemanusiaan, di mana didalamnya memuat prinsip dan hak-hak asasi manusia yang bersifat mutlak. HAM merupakan salah satu tolak ukur keberhasilan pemerintah suatu negara, di mana setiap warganya berhak mendapatkan perlindungan hukum yang sama, baik yang berada di dalam negeri maupun luar negeri. Disamping itu, anak-anak perlu mendapatkan perlindungan HAM secara khusus. Didukung pendapat Smith yang mengatakan bahwa secara sempurna, keseluruhan instrumen HAM internasional terletak pada “jantung” hak-hak anak (Smith, 2005).

Perkembangan teknologi yang semakin canggih memunculkan kasus pelanggaran HAM dengan menggunakan jaringan internet yang dilakukan di dunia maya. Kebebasan yang ditawarkan dapat memberikan efisiensi waktu bagi para pengguna, namun tak sedikit pula ditemukan pihak-pihak yang menyalahgunakan internet. *Cybercrime* merupakan kejahatan di dunia maya yang terjadi sebagai pengaruh negatif dari pengguna yang tidak dapat memanfaatkan internet dengan sebagaimana mestinya. Jenis *cybercrime* yang difokuskan dalam penelitian ini adalah *cyber harassment*, yakni *Online Sexual Abuse Exploitation of Children* (OSAEC). Kejahatan ini dapat disertai manipulasi atau ancaman terhadap anak untuk melakukan tindakan seksual di depan kamera, dan mendistribusikan *Child Sexual Abuse Exploitation Material* (CSAEM).

Berdasarkan studi dari *United Nations International Children’s Education Fund* (UNICEF) pada tahun 2016, ditemukan bahwa tingkat kerentanan anak-anak di negara Filipina mengalami kekerasan seksual secara *online* telah menyentuh angka 80%. Selain itu, diketahui bahwa 2,5% anak-anak telah memiliki konten yang mengekspos tubuh mereka tanpa menggunakan busana dan diunggah ke internet, serta dapat diakses oleh siapapun dengan mudah. UNICEF melaporkan bahwa Filipina merupakan negara yang menjadi sumber utama penghasil materi pelecehan seksual terhadap anak. Hal ini dibuktikan dengan data tahun 2010 dan 2017, di mana terdapat setidaknya 193.405 alamat IP tentang eksploitasi seksual anak. Kemudian ada sekitar 600.000 materi CSAEM yang dijual dan disebarluaskan secara *online* di tahun 2018. Pada tahun 2020 mengalami peningkatan signifikan sebesar 260% terhitung sejak diberlakukannya kebijakan *lockdown* (Cordero, 2023). Didukung data *Disrupting Harm Study 2022*, studi yang dilakukan oleh UNICEF, ECPAT International, serta Interpol menyatakan bahwa 20% anak-anak usia 12-17 tahun yang tercatat sebagai pengguna internet telah menjadi target OSAEC, di mana angka ini mewakili dua juta anak-anak. Hanya 0-3% korban yang melapor ke pusat bantuan dan 23-38% lainnya memilih untuk tidak melaporkan kejadian tersebut.

Menurut *Report in Person* pada tahun 2021, Filipina merupakan negara yang berada pada Tingkat satu sebagai negara di Asia Timur dan Pasifik dengan tingkat

eksploitasi seksual tinggi yang juga telah memenuhi standar minimum upaya pemberantasan tindak perdagangan manusia sejak tahun 2016 sampai 2021 (America, 2021). Merujuk pada *the Department of Justice Philippines* yang juga berdasarkan data dari *National Centre for Missing and Exploited Children* (NCMEC), pada saat pandemi, kasus OSAEC di Filipina mengalami lonjakan hingga 264,6%. Hal ini sama dengan tercatatnya 202.605 laporan yang dihitung mulai Maret sampai Mei tahun 2020 (Save The Children, 2020). Oleh sebab itu, pada tahun 2019 lalu, telah dibentuk Perintah Eksekutif No. 92 tentang *the National Council Against Child Labor* (NCACL) yang dibentuk untuk melindungi anak-anak terhadap pengeksploitasian (Institute for Labor Studies (ILS), 2022). Ada pula *the Council for the Welfare of Children* (CWC) yang merupakan bagian dari NCACL. CWC diberikan mandat khusus untuk koordinasi terkait implementasi seluruh undang-undang tentang perlindungan hak-hak anak dan membentuk kebijakan maupun program yang mendorong pengembangan potensi anak secara maksimal. Komunitas ini beranggotakan badan antar lembaga pemerintah yang fokus pada penanganan anak-anak.

Pemerintah Filipina telah menandatangani *the Implementing Rules and Regulations of Republic Act 11930* atau Undang-Undang Anti-Pelecehan atau Eksploitasi Seksual Online terhadap Anak dan Anti-Pelecehan atau Eksploitasi Seksual terhadap Anak. Sebelum berlakunya RA 11930, pemerintah telah menangani OSAEC melalui *the Inter-Agency Council Against Trafficking* dan *the Inter-Agency Council Against Child Pornography*, kerja sama dengan para pemangku kepentingan utama dalam melakukan beberapa kampanye advokasi, kegiatan peningkatan kapasitas bagi para aktor peradilan dan penyedia layanan, serta mendukung para korban OSAEC. Melihat upaya-upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah, masih terdapat banyak tantangan dalam implementasi RA 11930. Pemerintah membutuhkan strategi kemitraan dengan berbagai komunitas yang fokus terhadap penanganan kasus OSAEC, khususnya di negara Filipina. Oleh sebab itu, fenomena OSAEC perlu penanganan khusus melalui pendekatan multi-disiplin yang melibatkan kerja sama antar pemerintah negara, LSM, organisasi internasional, maupun pemangku kepentingan lainnya. Dengan berlandaskan teori neoliberalisme dan konsep HAM, maka tulisan ini diharapkan dapat mengkaji terkait strategi kemitraan pemerintah Filipina dalam menekan peningkatan kasus *Online Sexual Abuse Exploitation of Children* (OSAEC) pada tahun 2020-2023.

2. Metode Penelitian

Penelitian menggunakan pendekatan penelitian kualitatif, di mana menurut Bogdan dan Taylor, sebagaimana kutipan Lexy J. Moleong yang mengatakan bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian dengan prosedur yang menghasilkan data deskriptif, yakni kata-kata tertulis maupun lisan dari individu yang diamati (Meleong, 2007). Kemudian didukung pula dengan analisis mendalam agar dapat memahami lebih detail terkait isu yang diangkat (Neuman, 2016). Data yang akan diambil yaitu tentang strategi pemerintah Filipina dalam menekan peningkatan kasus Online Sexual Abuse Exploitation of Children (OSAEC) pada tahun 2020-2023 serta faktor-faktor pendukung dan faktor-faktor penghambat dalam melaksanakan strategi tersebut.

Jenis penelitian deskriptif, di mana penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan suatu fenomena, subjek, maupun tindakan. Kondensasi data yaitu kegiatan yang menunjukkan pada proses pemilihan, pemusatan, penyederhanaan,

pengabstrakan, dan atau transformasi data yang diperoleh peneliti dari hasil catatan lapangan, transkrip, dokumen, dan data dari penelitian lainnya. Proses pengumpulan data yang didapatkan dari hasil lapangan ini termasuk ke dalam kondensasi data. Metode pengumpulan data berasal dari buku, artikel publikasi, serta laporan tahunan dari berbagai lembaga. Jenis data yang digunakan adalah data kualitatif yang berbentuk kata-kata, gambar, dan bukan angka (Emzir, 2011). Analisis data didasarkan pada penggunaan teori relevan.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1 Tingkat Kasus OSAEC di Filipina Tahun 2020-2023

ASEAN Plan of Action Against Trafficking in Persons, Especially Women and Children (ACTIP) merupakan forum diskusi khusus mengenai kejahatan perdagangan manusia yang memiliki 4 fokus, yakni pencegahan, penegakan hukum, tuntutan kepada pelaku, perlindungan kepada korban, dan kerja sama serta koordinasi regional di bawah ASEAN maupun di lingkup internasional. ACTIP mengikat secara hukum dan menjadi dasar terciptanya berbagai upaya pemberantasan perdagangan manusia, khususnya bagi korban wanita dan anak-anak. ACTIP juga berfungsi sebagai wujud kemitraan ASEAN dan pedoman dalam penanganan kasus perdagangan manusia yang terjadi di tingkat regional (Jaya, B. P., Mucharom, R. S., Wibowo, D. E., Aisah, S. N., Sulastri, & Alifvia, 2023). ACTIP mulai resmi diberlakukan pada tanggal 8 Maret 2017, tepatnya setelah negara Filipina meratifikasi di tanggal 6 Februari 2017 (ASEAN, n.d.). ASEAN juga memperluas wilayah kerja samanya di bawah kerangka *ASEAN Regional Forum (ARF)*, yakni mencakup 27 negara di kawasan Asia Pasifik. Kerangka pendukung ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dan kualitas kerja sama lintas batas yang difokuskan dalam upaya pencegahan, perlindungan korban, dan tindak lanjut kasus tersebut.

Seiring perkembangan globalisasi, metode aksi kejahatan perdagangan manusia dapat dilakukan dengan memanfaatkan *platform* digital dan akses internet. *Online Sexual Abuse Exploitation of Children (OSAEC)* merupakan bentuk eksploitasi kepada pekerja anak yang paling kejam. Pelaku predator seksual menjadikan kelompok rentan anak-anak dari seluruh dunia sebagai target korban pelecehan seksual secara *online*. Aksi kejahatan ini melibatkan produksi, kepemilikan, distribusi CSAEM, serta siaran langsung yang mengarah pada pelecehan atau eksploitasi seksual. OSAEC merupakan salah satu dari dua akibat adanya kesenjangan perekonomian di kawasan yang signifikan dengan disertai peningkatan industri pariwisata dan ketersediaan internet yang didukung oleh teknologi komunikasi. OSAEC termasuk dalam bagian *Sexual Exploitation of Children (SEC)* yang juga mencakup *Sexual Exploitation of Children in Travel and Tourism (SECTT)*. SECTT merupakan jenis perdagangan manusia yang paling mengkhawatirkan, khususnya di Thailand dan Filipina. Upaya yang pernah dicapai ASEAN dalam memerangi SEC ialah memperkenalkan Undang-Undang yang melarang praktik SEC, memperketat sistem untuk melindungi anak-anak, serta meningkatkan akses dan sistem penuntutan terhadap pelaku kejahatan.

NCMEC melaporkan adanya peningkatan signifikan atas rujukan kasus yang melibatkan CSAEM kepada ASEAN yang kemudian akan ditindaklanjuti pada rentang tahun 2017 sampai 2019. Pada tahun 2017, NCMEC merujuk 290.800 kasus, 1.406.500 di tahun 2018, dan meningkat menjadi 1.011.4002 kasus di tahun

2019 (*Report of ASEAN Regional Conference on Child Online Protection*, 2020). Selanjutnya, pada tahun 2020, beberapa *ASEAN Member States* (AMS) mencatat adanya lonjakan kasus yang didominasi oleh fenomena siaran langsung pelecehan seksual terhadap anak (ASEAN, 2021). Hal ini dikarenakan pertumbuhan penggunaan internet yang semakin pesat di kawasan Asia Tenggara hingga menjadi wilayah dengan pengguna internet terbesar ketiga di dunia. Pengaruh terbesar ialah koneksi seluler yang mencapai 130% populasi lokal dan penggunaan media sosial (International, 2021).

Negara-negara anggota ASEAN memiliki kontribusi masing-masing terhadap peningkatan kasus OSAEC di tingkat domestik maupun regional. Misalnya, Filipina diyakini sebagai negara yang memproduksi CSAEM dengan penghasilan sebesar 1 miliar US dollar per tahun. Thailand sebagai negara tuan rumah terbesar penghasil gambar-gambar pelecehan seksual terhadap anak. Dibuktikan dengan data yang menunjukkan bahwa Thailand berada pada peringkat 6 dari 15 negara yang berpotensi menampung gambar pelecehan seksual terhadap anak pada tahun 2009 dan peringkat 14 dari 15 negara yang menjadi asal-usul situs web tersebut. Sedangkan Malaysia diidentifikasi sebagai negara yang populer bagi pelaku kejahatan kasus-kasus SEC, termasuk OSAEC (International, 2021).

November 2017, *ASEAN Commission on the Promotion and Protection of the Rights of Women and Child* (ACWC) mengadakan kegiatan *the Regional Workshop for Promoting Comprehensive and Harmonised National Legislation aimed at Preventing and Combating Online Child Sexual Exploitation in AMS*. Tindak lanjutnya ialah melalui kegiatan yang diselenggarakan pada bulan Februari 2018 di Jakarta, Indonesia oleh *Senior Officials Meeting on Social Welfare and Development the Inter-Sectoral Dialogue on Integrated National Responses to End Sexual Exploitation and Abuse of Children Online in ASEAN* (SOMSWD). Dialog ini menghasilkan usulan penyusunan deklarasi perlindungan anak terhadap eksploitasi dan pelecehan seksual *online*. Dipimpin oleh ACWC dan SOMSWD bersama dengan badan-badan ASEAN yang terkait, *the Declaration on the Protection of Children from All Forms of Online Abuse and Exploitation in ASEAN* diadopsi pada kesempatan KTT ASEAN ke-35 di bulan November 2019 yang diselenggarakan di Bangkok, Thailand. Dilanjutkan dengan pertemuan Konferensi Regional ASEAN tentang Perlindungan Anak di Dunia Maya di Bangkok pada bulan Februari 2020 yang membahas mengenai implementasi deklarasi tersebut.

Regional Plan of Action (RPA) for the Protection of Children from All Forms of Online Abuse and Exploitation in ASEAN ini menyediakan panduan tambahan atas keseluruhan *ASEAN RPA on the Elimination of Violence Against Children* (ASEAN RPA on EVAC), yang mengakui perlunya fasilitas khusus perlindungan anak secara *online* dan panduan tambahan. Secara umum, RPA tersebut ingin mempercepat upaya mengakhiri segala bentuk OSAEC di kawasan Asia Tenggara dengan tujuan khusus sebagai berikut: (1) Memberikan panduan konkret dan praktis dalam pelaksanaan 7 komitmen yang disebutkan dalam Deklarasi; (2) Mendukung upaya kemitraan negara-negara anggota ASEAN dalam memberikan perlindungan dan layanan lintas batas untuk pencegahan dan penanganan OSAEC di kawasan; (3) Merekomendasikan ASEAN agar memperkuat kerangka hukum dan kebijakan mengenai kekerasan terhadap anak, termasuk OSAEC; (4) Mendukung ASEAN dalam pengembangan rencana aksi nasional yang secara khusus menangani OSAEC, serta memungkinkan adanya pemantauan di tingkat nasional dan regional;

dan (5) Meningkatkan kemitraan regional dan internasional dengan pihak eksternal, seperti mitra diskusi ASEAN, Badan PBB, lembaga hukum internasional, LSM, entitas swasta, dan masyarakat sipil agar bersama-sama memerangi OSAEC.

Negara-negara anggota ASEAN memiliki tanggung jawab untuk menanganinya secara kolektif. Sejalan dengan pernyataan yang dikutip melalui *Trafficking in Persons (TIP) Report 2023*, kemitraan multidisiplin merupakan strategi penting dalam keberhasilan kerangka kerja sama “3P” yaitu penuntutan, perlindungan, dan pencegahan perdagangan manusia secara global (U. S. D. of State, 2023). Pemerintah didorong untuk memprioritaskan pembentukan kerja sama dengan para aktor dari berbagai lapisan, yakni secara internal ialah antar lembaga pemerintah sedangkan secara eksternal adalah dengan pemerintah negara lain, organisasi internasional, sektor swasta, akademisi, media, LSM, serta para penyintas dan kelompok penyintas. *The UN TIP Protocol* dan *the United States Trafficking Victims Protection Act of 2000*, yang telah diubah menjadi *the Trafficking Victims Protection Act (TVPA)*, menyatakan pentingnya 3P dan kemitraan strategis dalam membantu mengatasi perdagangan manusia secara global.

Tahun 2010, Majelis Umum PBB mengadopsi *Global Plan of Action to Combat Trafficking in Persons*, di mana hal ini juga menyoroti tentang kemitraan yang diperlukan. Kemudian pada tahun 2021, Majelis Umum PBB kembali mengumumkan komitmennya dan menyatakan bahwa *Global Plan of Action* dengan *2030 Agenda for Sustainable Development* saling menekankan pentingnya kemitraan. Kerangka kerja sama multilateral yang juga mendorong adanya kemitraan, yaitu *Addendum to OSCE’s Action Plan* yang menambahkan kata *partnership* sebagai “P” keempat dan melihat perlunya tindakan peningkatan kerja sama internasional (USA, 2023). Melihat berbagai komitmen internasional mengenai upaya penekanan terhadap tingkat perdagangan manusia. Semua negara anggota ASEAN merupakan pihak yang telah menandatangani *Convention on the Rights of the Child (CRC)*, *Optional Protocol to the CRC, on the sale of children, child prostitution, and child pornography* kecuali Australia. Negara-negara anggota ASEAN merupakan bagian dari *Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children*, yang mendukung *the United Nations Convention against Transnational Organized Crime*, dan semua anggota merupakan bagian dari *the International Labour Organization (ILO) Worst Forms of Child Labour Convention*, kecuali Brunei Darussalam. Negara Filipina sendiri merupakan satu-satunya anggota ASEAN yang sedang mempertimbangkan ratifikasi *Council of Europe Convention on Cybercrime (Budapest Convention)* dan *Convention on the Protocol of Children against Sexual Exploitation and Sexual Abuse (Lanzarote Convention)*.

Unit-unit kepolisian di wilayah regional telah terlibat dalam kerja sama internasional dengan melalui INTERPOL dan ASEANAPOL yang mempertemukan 10 negara anggota dan negara-negara dialog, yaitu China, Republik Korea, dan Jepang yang dihubungkan melalui petugas penegak hukum asing. Filipina sendiri terkoneksi dengan *Virtual Private Network of the National Center for Missing and Exploited Children (NCMEC)*. Lalu *Department of Justice Office of Cybercrime* akan diberikan informasi ketika NCMEC menerima laporan yang berkaitan dengan Filipina dengan melalui *CyberTipline*. Selain itu, Filipina bersama dengan Kamboja dan Thailand merupakan anggota *Global Alliance against Child Sexual Abuse Online*, yakni sebuah inisiatif bersama Uni Eropa dan AS (UNICEF, 2016).

Tahun 2019, *International Justice Mission* (IJM) bersama pemerintah dan pemangku kepentingan dari U.S.-PH *Child Protection Compact* (CPC) melakukan studi yang menemukan fakta bahwa 149 dari setiap 10.000 alamat *Internet Protocol* (IP) penggunaannya meningkat yang kebanyakan merupakan kasus OSAEC di tahun 2017 (IJM, 2020). Filipina dikonfirmasi sebagai negara hotspot global untuk OSAEC (Report, 2023). *Department of Justice* (DOJ) yang mengutip data perusahaan nirlaba internasional, mengatakan bahwa laporan OSAEC di pulau terpadat Filipina melonjak lebih dari 260% selama waktu karantina berlangsung. *The National Center for Missing and Exploited Children* (NCMEC), yang melakukan operasi *Cyber Tipline Report* (CTR) atau *hotline* kasus-kasus OSAEC, menemukan adanya 279.166 laporan terhitung dari tanggal 1 Maret sampai 24 Mei 2020. Angka tersebut lebih tinggi 264,63% atau sekitar 202.605 kasus, yang mana memperlihatkan adanya lonjakan cukup signifikan apabila dibandingkan dengan periode yang sama di tahun lalu yang hanya mencatat 76.561 laporan (Gullim, 2023).

Berdasarkan *the National Baseline Study on Violence Against in the Philippines* yang dilakukan oleh CWC dan UNICEF di tahun 2016, menunjukkan bahwa 43,7% anak-anak berumur 13 sampai 18 tahun telah menjadi korban OSAEC. Ancaman ini menjadi semakin serius sejak pandemi COVID-19, yaitu meningkat sebanyak 265% dari tahun sebelumnya, atau dengan 279.166 laporan terhitung dari tanggal 1 Maret sampai 24 Mei 2020 (Gullim, 2023). DOJ menyatakan bahwa pada tanggal 15 Maret sampai 21 Mei 2020, terhitung ada 4 pengaduan di kota Caloocan, Taguig, Angeles di Pampanga, dan Butuan. Sementara dua kasus lainnya berada di Kota Lapu-Lapu dan pada saat itu sedang proses persidangan. Masih dalam periode yang sama, *Philippine Internet Crimes Against Children Center* (PICACC) yang merupakan kolaborasi antara lembaga hukum lokal dan internasional berhasil menangkap 7 tersangka dan menyelamatkan 34 anak. DOJ dan polisi juga mengonfirmasi bahwa administrator laman aplikasi *Facebook* yang mempromosikan OSAEC terancam hukuman penjara selama 17 tahun 4 bulan dan dapat dikenai denda sebesar P1 juta (Navallo, 2020).

Bulan Februari 2021, *Arise Foundation* melaporkan bahwa 83% korban OSAEC adalah perempuan dan 17% laki-laki. *Plan International* merencanakan sebuah penelitian dan kampanye yang diberi nama *FreeToBeOnline*, di mana proyek ini berhasil mengungkap bahwa 7 dari 10 anak perempuan mengaku pernah mengalami pelecehan yang dilakukan melalui media sosial. Pada tahun 2022, berdasarkan perkiraan dari studi perintis *Scale of Harm* yang diinisiasi oleh *International Justice Mission* (IJM) dan *University of Nottingham Rights Lab* bersama dengan para penyintas, ditemukan hampir setengah juta anak Filipina, atau 1 dari 100 anak telah diperdagangkan, lalu dipaksa memproduksi CSAEM demi meraup keuntungan. Berdasarkan studi *Disrupting Harm Study* tahun 2022 yang dilakukan oleh kolaborasi antara UNICEF, ECPAT International, dan INTERPOL, ditemukan bahwa 20% anak-anak yang menggunakan internet dengan rentang usia 12-17 tahun telah menjadi sasaran OSAEC. Sebanyak 23-38% korban tidak memberi tahu kepada siapapun tentang kejadian yang dialami, dan hanya berkisar 0-3% yang melapor kepada polisi ataupun pusat bantuan. Oleh sebab itu, IJM bersama para penyintas mengambil tindakan untuk menyerukan kepada para pemimpin negara, perusahaan teknologi, serta lembaga keuangan untuk memberikan perlindungan

kepada anak-anak sebagai upaya menekan jumlah kasus OSAEC yang terlihat semakin meningkat.

Tahun 2023, *Council for Welfare of Children* melaporkan total jumlah kasus kekerasan terhadap anak mencapai angka 17.681. Jumlah ini terbilang lebih rendah apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang menyentuh lebih dari 19.000 kasus. Berdasarkan hasil pemantauan, Tapales mengatakan bahwa tiga jenis kasus kekerasan pada anak yang paling banyak terjadi pada tahun 2022 sampai 2023, adalah pelanggaran RA No. 7610 atau *Special Protection of Children against Abuse, Exploitation and Discrimination Act* yang berkaitan dengan tindakan pelecehan, pemerkosaan, dan eksploitasi terhadap anak. Dilanjutkan dengan data terkait OSAEC, di mana ada sekitar 1000 kasus yang terindikasi unsur-unsur OSAEC dan terdapat lebih dari 300 kasus OSAEC yang telah diajukan dari tahun sebelumnya. Di tahun yang sama, data operasi yang didukung IJM menyatakan bahwa penegak hukum Filipina telah menyelamatkan 1.181 korban dan individu yang rentan, menangkap 359 tersangka di mana 202 di antaranya sudah divonis bersalah (S. Philippines, 2023).

Praktik kejahatan OSAEC bertentangan dengan berbagai prinsip-prinsip HAM, konvensi dan instrumen hukum internasional maupun nasional yang berhubungan dengan penghormatan atas hak-hak anak di seluruh dunia. Pasal 1 *the Universal Declaration of Human Rights* (UDHR) tahun 1948 menyebutkan bahwa, “semua manusia dilahirkan dengan martabat dan hak yang setara. Mereka diberikan akal budi serta hati nurani yang hendaknya berinteraksi satu sama lain dalam suasana persaudaraan”. Pasal 4 UDHR menyatakan bahwa, “tidak satu pun manusia boleh diperbudak atau diperhambakan; segala bentuk perbudakan dan perdagangan harus dihilangkan” (Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights, n.d.). Kedua pasal tersebut menekankan kepada negara-negara di seluruh dunia untuk melindungi hak-hak perempuan dan anak agar tidak diperdagangkan dengan cara apapun. *The United Nations on the Rights of the Child* (CRC) yang diadopsi oleh Majelis Umum PBB pada tanggal 20 November 1989, sebuah perjanjian HAM menyangkut anak yang paling banyak diratifikasi (UNICEF East Asia and the Pacific Regional, The ASEAN Secretariat, 2019). *ASEAN Convention Against Trafficking in Persons, Particularly Women and Children* (ACTIP), sebagai kerangka kerja utama yang mengikat AMS dalam upaya pemberantasan perdagangan manusia yang melibatkan anak-anak dan perempuan. *The Declaration on the Protection of Children from All Forms on Online Abuse and Exploitation in ASEAN*, yang menegaskan lebih dalam terkait komitmen perlindungan anak dari segala bentuk eksploitasi dan pelecehan secara *online*.

Mengacu pada *the Declaration on the Protection of Children from All Forms on Online Abuse and Exploitation in ASEAN*, tindakan kejahatan OSAEC telah melanggar hukum dalam negeri Filipina, yaitu *IRR of Republic Act 11930* tentang Undang-Undang Anti-Online Sexual Abuse Exploitation of Children (OSAEC) dan Undang-Undang Anti-Child Sexual Abuse or Exploitation Materials (CSAEM). Berdasarkan platform yang digunakan, OSAEC juga bertentangan dengan Undang-Undang tentang berbagai kejahatan dunia maya, terutama yang berkaitan dengan CSAEM. Undang-Undang yang dimaksud ialah RA 10175 atau *Cybercrime Prevention Act of 2012*, RA 9775 atau *Anti-Child Pornography Act of 2009*, RA 9208 atau *Anti-Trafficking in Persons Act of 2003*, RA 9995 atau *Anti-Photo and Video Voyeurism Act of 2009*, RA 7610 atau *Special Protection of Children against Abuse*,

Exploitation and Discrimination Act, dan RA 9262 atau *Anti-Violence Against Women and Their Children Act of 2004*.

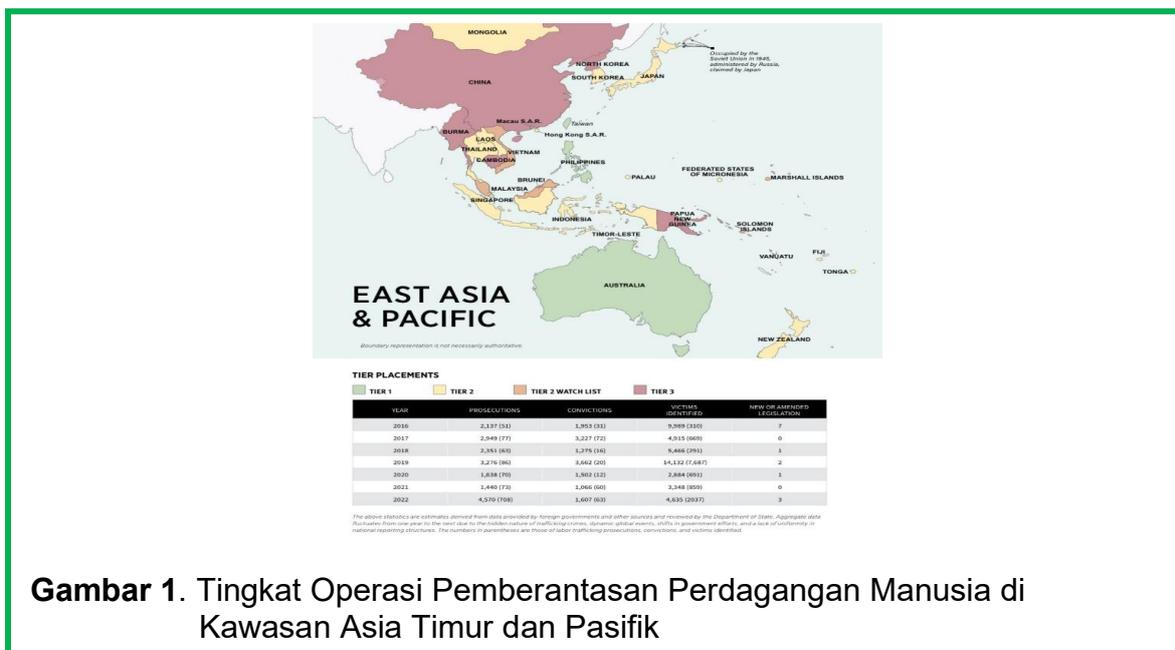
3.2 Komitmen Pemerintah dalam Memitigasi Kasus OSAEC di Filipina

Tanggal 23 Agustus 2022, pemerintah mengeluarkan deklarasi “*War on Online Sexual Abuse and Exploitation of Children*”. Aksi perlawanannya yang pertama dilakukan adalah dengan membangun kerja sama antara pemerintah dengan beberapa departemen penegak hukum, LSM, dan Departemen Keamanan Dalam Negeri AS yang membentuk satuan tugas dengan tujuan memberantas pelecehan seksual dan eksploitasi anak. Strategi yang disusun untuk menekan perkembangannya adalah melalui kerja sama dengan penyedia layanan internet dan *wire-transfer company* untuk melacak riwayat transaksi dari kedua sisi. Kemudian penandatanganan *the Implementing Rules and Regulation (IRR) of Republic Act 11930* tentang Undang-Undang Anti-Online Sexual Abuse Exploitation of Children (OSAEC) dan Undang-Undang Anti-Child Sexual Abuse or Exploitation Materials (CSAEM) dilakukan pada tanggal 18 Mei 2023, bertujuan untuk memperkuat peran alat penegakan hukum, khususnya Undang-Undang Anti-OSAEC dan Anti-CSAEM atau RA 11930, yang ditetapkan pada tanggal 30 Juli 2022 lalu (IJM, 2023). Undang-Undang ini berisikan mandat yang ditujukan kepada penyedia *platform* media sosial, layanan digital, perantara internet dan keuangan untuk memblokir CSAEM, sekaligus berkoalisi dengan lembaga hukum dengan memfasilitasi sarana pengawasan dan investigasi kasus-kasus OSAEC. Kemudian Pusat Koordinasi Nasional yang dioperasikan di bawah IACAT dibentuk sebagai aksi nyata dalam meningkatkan efektifitas pemberian bantuan perlindungan dan pemenuhan kebutuhan psiko-sosial bagi anak-anak yang menjadi korban OSAEC.

IRR ini menyerukan kepada seluruh lembaga pemerintah supaya menerapkan program *Social Behaviour Change (SBC)* sehingga dapat mengatasi rendahnya tingkat pelaporan sebagai akibat dari norma-norma sosial yang berkontribusi akan tingginya kasus OSAEC di negara tersebut. Ketentuan IRR terkait pendekatan kepada seluruh masyarakat untuk mencegah OSAEC dan penyediaan akses perawatan berkelanjutan bagi anak-anak yang menjadi korban, yaitu: (1) Mengembangkan rencana dan tata cara yang memperhatikan unsur gender, inklusif disabilitas, dan peka budaya; (2) Meningkatkan peran perantara internet, di mana merupakan jalur rujukan yang fokus terhadap anak dengan mekanisme umpan balik; (3) Harmonisasi dan penyesuaian standar database dan mendorong unit pemerintah daerah supaya segera memberlakukan peraturan tentang OSAEC di daerah masing-masing (U. Philippines, 2023).

Acara penandatanganan dihadiri oleh organisasi-organisasi yang turut terlibat dalam proses penyusunan IRR. Dalam hal ini, IJM hadir bersama DOJ dan *Department of Social Welfare and Development (DSWD)*, serta para pejabat pemerintah dan pemangku kepentingan yang juga memiliki ambisi untuk memerangi OSAEC. Beberapa lembaga-lembaga pemerintah dan LSM, termasuk IJM, berkolaborasi sebagai kelompok kerja teknis khusus Penegakan Hukum, Penuntutan dan Investigasi. *The DOJ Inter Agency Council Against Trafficking (IACAT)* merupakan pihak-pihak yang memelopori agenda ini dengan dorongan kuat dari UNICEF dan *UP Law Center Institute of Government and Law Reform*. Sebelum diberlakukannya RA 11930, pemerintah sudah terlebih dahulu aktif menangani OSAEC melalui *Inter-Agency Council Against Trafficking* dan *Inter-Agency Council Against Child Pornography*, bersama dengan para pemangku

kepentingan utama untuk menjalankan beberapa kampanye advokasi, tindakan yang mendorong peningkatan kapasitas bagi penegak hukum dan penyedia layanan pengaduan, serta memberikan dukungan penuh terhadap korban OSAEC.



Gambar 1. Tingkat Operasi Pemberantasan Perdagangan Manusia di Kawasan Asia Timur dan Pasifik

Berdasarkan *Trafficking in Persons (TIP) Report* tahun 2023, Filipina, Australia, dan Taiwan merupakan negara-negara di kawasan Asia Timur dan Asia Pasifik yang berada pada tingkat pertama (USA, 2023). Sebelumnya, Departemen Luar Negeri AS juga memberikan status Tingkat satu kepada Filipina dalam laporan tahunan *Global Trafficking in Persons Report* selama tujuh tahun berturut-turut (Rescue, 2022). Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah Filipina telah memenuhi standar TVPA dan memiliki kesadaran yang cukup tinggi terhadap urgensi dari fenomena kasus tersebut di negaranya. Meskipun begitu, pengimplementasian hal-hal yang termuat dalam Undang-Undang RA 11930 seringkali masih menghadapi tantangan dan kesenjangan.

The Philippine National Police (PNP) merupakan badan penegak hukum di tingkat nasional dengan cabang-cabang khusus yang menangani wilayah dan bentuk kegiatan kriminal tertentu, seperti pelecehan seksual kepada perempuan dan anak, serta operasi kontraterorisme (Trade, 2021). PNP merupakan pemimpin dalam penyelidikan di sebagian besar kasus OSAEC. Terdapat dua divisi yang berfokus pada penyelidikan OSAEC, yaitu *PNP Women and Children Protection Centre (PNP-WCPC)* dan *PNP Anti-Cybercrime Group*. PNP-WCPC bertanggung jawab dalam informasi intelijen dan melanjutkan tindakan setelah mendapatkan petunjuk dari badan penegak hukum asing. Badan ini membentuk divisi khusus yang difokuskan untuk menanggapi fenomena meningkatnya jumlah kasus OSAEC (ECPAT, INTERPOL, 2022). Sedangkan *PNP Anti-Cybercrime Group* bertugas untuk melakukan penyelidikan terhadap pelanggaran dari penggunaan teknologi informasi dan komunikasi, khususnya OSAEC (ECPAT, INTERPOL, 2022). Dalam hal menginvestigasi, pemerintah juga menjalin kerja sama dengan pemerintah asing, seperti Australia, Inggris, Malaysia, Irlandia, dan Amerika Serikat (U. D. of State, 2022). Meskipun sudah memiliki kompetensi yang cukup, namun anggota

PNP memiliki keterbatasan pada sumber daya dan kapasitas sehingga menyebabkan kurangnya koordinasi dengan mitra kerja sama lainnya.



Kasus-kasus OSAEC di Filipina pada tahun 2020 hingga 2023 menunjukkan dinamika tren yang naik turun. Pada tahun 2020, pengadilan berhasil menjatuhkan hukuman kepada kurang lebih 100 pelaku kejahatan, angka ini jauh meningkat jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Kondisi tersebut dapat diartikan dari dua sisi yang kontradiksi. Pertama, tingkat perdagangan manusia yang semakin meningkat atau adanya perbaikan sistem peradilan pidana yang semakin efektif dalam memberantas pelaku kejahatan tersebut. Penangkapan tersangka mengalami penurunan di tahun 2020, yakni dari 43 menjadi 35 orang. Kemudian jika dibandingkan dengan tahun 2019, di mana operasi yang berhasil dilakukan oleh polisi dalam menangani kasus OSAEC berjumlah 39 operasi, maka tahun 2020 telah mengalami peningkatan sebanyak 61% atau 63 operasi. Adanya lonjakan ini sekaligus mengkonfirmasi bahwa jumlah korban yang berhasil diidentifikasi juga mengalami peningkatan, yakni 197 korban yang berhasil diselamatkan. Jumlah ini meningkat sebanyak 55 individu dari tahun sebelumnya (nter-Agency Council Against Trafficking, 2020).

Tahun 2022, ditemukan adanya peningkatan tajam sebanyak 35,2% dalam laporan transaksi mencurigakan atau *suspicious transaction reports* (STRs) terkait OSAEC, atau menjadi 92.200 dari 68.214 laporan di tahun sebelumnya. Disisi lain, nilai nominal transaksi justru mengalami penurunan sebanyak 52%, yaitu dari total P 996,7 juta di tahun 2019 menjadi P478,28 juta di tahun 2022. Kemudian AMLC menemukan transaksi mencurigakan sebesar P1,56 miliar yang mengarah pada indikasi praktik OSAEC (BusinessWorld, 2023). Di tahun yang sama, pemerintah mendeklarasikan perang terhadap tren kasus OSAEC dengan pendekatan yang melibatkan banyak departemen dan lembaga yang terkait. Pemerintah memperkuat badan *Barangay Child Protection Council* (BCPC) di tingkat lokal dan merancang peraturan kota dan kotamadya dalam rangka melakukan upaya perlindungan anak. Tingkat pemberian hukuman pada kasus-kasus OSAEC adalah 92% di tahun 2020,

tetapi 53% dari keseluruhan dicapai dengan proses tawar-menawar (Lab, 2023). Data terbaru menyatakan bahwa kasus OSAEC di Filipina mengalami penurunan hampir 27% terkait jumlah korban dibandingkan dengan tahun 2022. PNP-WCPC juga melaporkan bahwa ada penurunan jumlah korban yang berhasil diselamatkan, yaitu dari 163 menjadi 119 korban di tahun 2023 (Tupas, 2024).

Berbagai upaya-upaya berkelanjutan yang dilakukan pemerintah dengan memperhatikan dampak dari pandemi Covid-19 terhadap ruang gerak operasi pemberantasan perdagangan manusia, menjadikan Filipina tetap berada pada Tingkat satu dalam standar minimum pemerintah dalam menanggapi kasus perdagangan manusia. Tindakan yang dilakukan untuk meraih penghargaan itu ialah dengan menginvestigasi dan menuntut lebih banyak pelaku kejahatan perdagangan manusia, memperbaharui dan memperkuat Undang-Undang anti-perdagangan manusia, meningkatkan anggaran untuk pergerakan *the Inter-Agency Council Against Trafficking* (IACAT), serta memperbanyak jumlah jaksa dan staf badan koordinasi yang mengurus terkait jenis kasus tersebut. Dalam hal upaya perlindungan korban, pemerintah telah menyediakan tempat penampungan dan pusat layanan di Manila, serta membantu sekitar 1000 korban perdagangan manusia (America, 2021).

Sebelumnya, badan-badan pemerintah melaporkan adanya kebutuhan penambahan sumber daya untuk penegak hukum yang bertugas, dana operasi, serta alat-alat yang memadai untuk analisis forensik bukti digital yang kuat. Hal ini dikarenakan seringkali ditemukan adanya praktik penyyuapan terkait kejahatan OSAEC, di mana *DOJ's Office of Cybercrime* menerima lebih dari 2,5 juta di tahun 2022. Tantangan lainnya adalah pergerakan pengadilan yang lambat, perlunya pelatihan khusus keterampilan penanganan bukti digital dalam persidangan, serta jumlah jaksa penuntut yang terlalu sedikit sehingga prosesnya menjadi tidak efisien. Di tahun 2022, pemerintah menjalin kerja sama dengan LSM dan pemerintah luar negeri; mengadakan pelatihan polisi, petugas imigrasi, jaksa, hakim, dan pekerja sosial. IACAT juga melakukan penandatanganan *Memorandum of Understanding* (MoU) dengan badan *Anti-Money Laundering Council* dalam rangka meningkatkan interaksi kerja sama penyelidikan, serta penuntutan kasus perdagangan manusia dan pencucian uang.

Upaya pemerintah mengalami kemajuan dalam hal peraturan penegak hukum. Contohnya *Anti-Trafficking in Persons Act* yang diamandemen mencakup kriminalisasi perdagangan seks dan tenaga kerja, memperketat hukuman dengan penetapan maksimal 20 tahun penjara dan denda sekitar satu sampai dua juta peso, serta mengatur penambahan hukuman finansial dan memperluas data praktik yang dilakukan oleh sektor swasta dalam keterlibatannya pada kejahatan perdagangan manusia. Undang-Undang juga mengatur mengenai perluasan jenis-jenis eksploitasi dalam praktik perdagangan manusia, termasuk produksi dan distribusi CSAEM. LSM dan mitra lainnya juga banyak berkontribusi dalam mendorong kemajuan sistem perlindungan anak dengan memberikan bantuan di berbagai layanan, termasuk proses rujukan, mendapat kesaksian, operasi penyelamatan, dan menyediakan tempat perlindungan korban (UNICEF, 2022).

3.3 Strategi Kemitraan Pemerintah dalam Menekan Peningkatan Kasus OSAEC pada Tahun 2020-2023

The Council for the Welfare of Children (CWC) dan *Department of Social Welfare and Development (DSWD)* merupakan lembaga pemerintah yang mempunyai peran utama dalam melindungi hak anak-anak di Filipina. CWC bertanggung jawab dalam membuat rumusan, mengkoordinasikan, serta memantau penerapan kebijakan dan program yang berkaitan dengan anak-anak. DSWD memegang tanggung jawab dalam memastikan kesejahteraan sosial seluruh warga Filipina dan memfasilitasi layanan publik, terutama bagi anak-anak yang membutuhkan perlindungan khusus (UNICEF, 2022). Sedangkan lembaga pemerintah lainnya bertugas mengembangkan dan melaksanakan kebijakan dan program tersebut, berdasarkan mandat hukum dan bidang keahlian masing-masing. Kemudian badan koordinasi khusus dibentuk untuk menangani segala permasalahan tertentu pada anak-anak, seperti OSAEC.

Bulan Februari 2019, *Philippine National Police (PNP)*, *National Bureau of Investigation (NBI)*, *Australian Federal Police*, *U.K. National Crime Agency (NCA)*, dan *International Justice Mission (IJM)* meluncurkan *Philippines Internet Crimes Against Children Center (PICACC)* untuk memperkuat kemitraan penegakan hukum di lingkup global dalam mendorong penghapusan OSAEC (UNICEF, 2022). PICACC juga menjadi pusat koordinasi yang mengutamakan laporan dari sumber asing, termasuk lembaga hukum asing dan NCMEC. Sejak peresmian PICACC, *the NBI Anti-Human Trafficking Division (AHTRAD)*, dan *PNP Women and Children Protection Center (WCPC)* berhasil melaksanakan 179 operasi, menyelamatkan 526 korban, mengidentifikasi 88 tersangka, serta mengadili 13 pelaku. Kolaborasi ini telah menyelamatkan 526 korban OSAEC di Filipina dalam tiga tahun terakhir sejak pembentukannya (IJM, 2022).

Regional Development Council and Provincial/City/Municipal and Barangay Councils for the Protection of Children (LCPCs) dibentuk pada tingkat barangay, kotamadya, kota, dan provinsi, serta *Regional Sub-Committees on the Welfare of Children (RSCWC)* yang menghubungkan pemerintah pusat dengan unit pemerintah daerah. Lembaga pemerintah daerah di bidang kesejahteraan sosial, pendidikan, kesehatan, penegak hukum, LSM, dan perwakilan anak hingga remaja juga turut dilibatkan dalam pelaksanaan tugasnya. Di samping itu, terdapat badan-badan yang proaktif dalam pemberantasan OSAEC, yaitu DSWD, VAWC, PNP, *Municipal Social Welfare and Development Office (MSWDO)*, *City Social Welfare and Development Office (CSWDO)*, *Women and Children Protection Desk (WCPD)*, *Regulatory and Complaint Board (RCB)*, dan *Barangay Council for the Protection of Children (BCPC)*. Mekanisme rujukan lokal melibatkan *Local Social Welfare and Development Office (LSWDO)*, *Women and Children Protection Units (WCPUs)*, polisi setempat, serta pengadilan yang dibentuk untuk menangani kasus pelecehan, penelantaran, dan eksploitasi yang terjadi di dalam lingkup keluarga (UNICEF, 2022).

Filipina memiliki banyak organisasi non-pemerintah (LSM) internasional yang bergerak di bidang perlindungan hak-hak anak. Program-program yang dijalankan seringkali lebih terfokus pada wilayah-wilayah yang telah teridentifikasi memiliki permasalahan pada aspek perlindungan anak. *World Vision* merupakan organisasi kemanusiaan yang berfokus pada pemberian bantuan, pengembangan, dan advokasi dengan target mulai tahun 2020 hingga 2025. Organisasi ini didedikasikan

untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat, terutama anak-anak yang rentan. Diungkapkan dalam *Philippines Impact Report* tahun 2022, *World Vision* di Filipina menjalankan misi *Child Protection and Participation* dengan memobilisasi anak-anak, keluarga, sekolah, dan segenap masyarakat untuk menuntaskan pemberantasan faktor-faktor penyebab terjadinya kekerasan anak (Foundation, 2022). Di dukung kemitraan bersama lembaga pemerintah dan organisasi yang memiliki satu pandangan dalam memperketat peraturan hukum tentang bentuk pekerjaan terburuk bagi anak, termasuk OSAEC. *World Vision* Filipina tersebar di 41 provinsi, 18 kota, dan 110 kota madya (Foundation, 2022).

Project Against Child Exploitation (ACE) merupakan bukti nyata dari komitmen *World Vision* terhadap upaya menekan segala bentuk pekerjaan terburuk bagi anak, termasuk OSAEC dan *Violation of Acceptable Conditions of Work (VACW)*. Dimulai sejak tahun 2019, proyek ACE mendapatkan pendanaan dari *United State Department of Labor* di Filipina. Kemudian pada tahun 2021, proyek ACE memperluas jangkauannya hingga ke Vietnam. Proyek ini berjalan efektif mulai tahun 2021 dan diperkirakan sampai bulan September 2024. Selama itu, kedua negara saling memperkuat kapasitas pemerintah dari masing-masing negara supaya dapat mencapai tujuan bersama. Dalam suatu pertemuan, mitra dari kedua negara saling membagikan pencapaian, tantangan, serta pembelajaran yang mereka hadapi. Keduanya sama-sama menyoroti tentang bagaimana proyek ini dijalankan sehingga berhasil meningkatkan kerangka hukum, kebijakan pemerintah, layanan bantuan, sekaligus kemitraan tersebut. Di akhir acara, para mitra kembali menegaskan komitmennya dalam menangani pekerja anak, termasuk OSAEC dan VACW (Vision, 2023).

Berikut pencapaian signifikan yang dihasilkan melalui proyek-proyek yang telah dijalankan dari tahun 2020 hingga 2022, yaitu: (1) Laporan OSAEC yang diterima telah 100% ditanggapi dan diteruskan kepada pusat bantuan. (2) Terdapat 35.198 anak yang dilibatkan dalam upaya pemberantasan kekerasan terhadap anak. (3) Penjangkauan 730 anak yang dirujuk ke penyedia layanan maupun secara langsung. (4) Sejumlah 970 anak dan remaja merasa telah mendapatkan perlindungan yang tepat. (5) Sebanyak 54 lembaga mitra lokal mempersiapkan aksinya untuk anak-anak. (6) Menjangkau 43 kelompok agama untuk turut memobilisasi perdamaian dan perlindungan anak; memberikan pelatihan 1.034 orang tentang kebijakan perlindungan anak, pelaporan dan rujukan, serta sistematisasi dalam menangani bentuk-bentuk pekerjaan terburuk anak (World Vision Development Foundation, 2022). Lebih lagi, *World Vision* telah berhasil mempengaruhi sekitar 82 kebijakan, di mana 8 diantaranya merupakan kebijakan tingkat nasional.

SaferKidsPH (SKPH) merupakan kemitraan antara pemerintah Australia dengan melibatkan *Safe the Children* Filipina, *The Asia Foundation*, serta UNICEF. SKPH sejalan dengan komitmen Australia dan Filipina dalam melawan segala bentuk eksploitasi anak, serta memperluas inisiatif Australia di bidang keamanan siber, perdagangan manusia, serta kolaborasi lembaga penegak hukum, yaitu *Australia's International Cyber and Critical Technology Engagement Strategy*, *ASEAN Australia Counter Trafficking Program*, *the Australian Centre to Counter Child Exploitation*, dan *Philippine Internet Crime Against Children Center* (Horizon, 2023). Inisiatif dengan dana sebesar \$8 juta dalam jangka waktu kerja selama 6 tahun (2019-2025) memiliki tujuan untuk turut berkontribusi dalam upaya menekan

SEC di Filipina. Kemitraan ini didukung oleh *Australian Federal Police (AFP)* dan UNICEF Filipina. AFP memberikan hibah sebesar AUD 500.000 untuk aspek penegakan hukum dan pengembangan kapasitas dalam menuntaskan OSAEC. Sedangkan UNICEF Filipina dengan kapasitasnya sebagai pemimpin akan menggelontorkan dana sebesar AUD 7,5 juta.

SKPH menjalani tinjauan *Theory of Change (ToC)* dan penilaian evaluasi di tahun 2020. Tinjauan Jangka Menengah dilaksanakan pada akhir tahun 2022, yakni tiga tahun setelah program berjalan. Peningkatan sistem perlindungan anak dilakukan dengan melibatkan anak-anak dan keluarga mereka, pemerintah Filipina, serta pihak swasta untuk menjamin bahwa anak-anak terlindungi saat sedang mengakses internet. Ruang lingkupnya meliputi upaya meningkatkan kesadaran masyarakat, seperti memperkuat kapasitas aktor pengadilan, legislasi, polisi, dan penyidik dalam menanggapi kasus OSAEC, serta memperluas penyediaan layanan bantuan di tingkat barangay, sekolah, dan kelompok masyarakat. SKPH berupaya untuk mencapai empat hasil akhir program, yaitu: (1) perilaku dan praktik positif dalam proses perlindungan anak dari OSAEC; (2) penegakan hukum, jaksa, dan peradilan dalam memperkuat kebijakan dan sistem perlindungan anak dari OSAEC; (3) memperluas penyediaan layanan pencegahan OSAEC dan perlindungan anak di komunitas rentan; (4) kebijakan dan hukum anti OSAEC yang berbasis pada bukti. SKPH dikelola melalui model konsorsium, dengan UNICEF sebagai pemimpin, didukung oleh *The Asia Foundation (TAF)* dan *Save the Children Philippines (SCP)*. Implementasinya difokuskan pada skala nasional, dengan titik perhatian di Wilayah Ibu Kota Nasional, kota-kota Cagayan de Oro, Iligan, dan Angeles (Horizon, 2023). SKPH juga akan mendapatkan manfaat dari upaya mendukung mitra Filipina dalam memerangi OSAEC, di mana hal ini melibatkan pembentukan hubungan bilateral dan multilateral, serta meningkatkan kemitraan dengan sektor swasta. Kompleksitas fenomena OSAEC membuat ekspektasi yang diharapkan bukan lagi tentang hasil, tetapi meningkatkan kesadaran dan keterampilan dalam menanggapi kasus tersebut.

Selaras dengan teori neoliberalisme, pemerintah cenderung merespon fenomena OSAEC dengan membentuk hubungan kerja sama multilateral yang diimbangi dengan kesadaran akan tingkat kompleksitas dan keterbatasan sumber daya. Kemitraan strategis multidisiplin yang berlapis-lapis merupakan pola yang dilakukan pemerintah Filipina dalam rangka mewujudkan komitmennya untuk memerangi kasus-kasus OSAEC, terutama di dalam negeri. Keuntungan yang akan didapatkan pemerintah adalah mendapatkan banyak dukungan di beberapa aspek utama, seperti tempat rujukan, bantuan pemulihan korban, operasi penyelamatan, proses penegakan hukum yang adil, serta penyedia layanan internet agar anak-anak merasa aman ketika berjejaring di dunia maya. *TIP Report 2023* menegaskan bahwa pemerintah sangat fokus terhadap kepemimpinannya dalam menangani perdagangan manusia dengan melibatkan para mitra yang tak terhitung jumlahnya. Laporan ini menekankan pada kemitraan yang berpusat pada penyintas, seperti memberikan pelatihan perawatan kepada para petugas yang terlibat supaya menghindari penyintas mengalami trauma lebih lanjut. Dalam hal ini, secara tidak langsung menyatakan bahwa strategi kemitraan pemerintah cukup berhasil dalam membawanya menjadi pemimpin yang proaktif terhadap upaya memerangi perdagangan manusia, termasuk OSAEC. Namun bukan berarti pemerintah telah berhasil menghapuskan isu OSAEC karena kompleksitasnya yang tinggi

menyebabkan ekspektasi yang diharapkan bukan lagi tentang hasil, tetapi mampu meningkatkan kesadaran dan keterampilan dari pihak-pihak yang bertugas dalam penanganan kasus tersebut.

Di sisi lain, keberhasilan strategi kemitraan pemerintah yang paling terlihat signifikan adalah di aspek penegakan hukum. Perluasan bentuk-bentuk eksploitasi yang tercantum dalam Undang-Undang Anti Perdagangan Manusia, menetapkan kewajiban perusahaan internet untuk membuka seluruh informasi kejahatan perdagangan seks kepada penegak hukum, serta mengadakan pelatihan untuk aparat, pekerja sosial, dan petugas imigrasi dalam rangka mempersiapkan personel yang dikhususkan untuk menangani kasus OSAEC. Didukung oleh kerja sama antara INTERPOL dan ASEANAPOL yang menghubungkan AMS dengan negara-negara dialog, serta partisipasinya di dalam inisiatif *Global Alliance against Child Sexual Abuse Online*. PICACC menyatakan bahwa keberhasilan kerja sama ini dapat terlihat melalui operasi yang telah menyelamatkan 526 korban terhitung sejak pembentukannya di tahun 2019 hingga 2022, serta banyak mencegah operasi yang dilakukan oleh pelaku kejahatan di dalam maupun luar negeri. PICACC juga membantu *the NBI Anti-Human Trafficking* dan PNP-WCPC dalam menjalankan perannya sebagai divisi yang bertugas mengkoordinasikan dan memimpin upaya penanganan perdagangan manusia, terutama kasus OSAEC di Filipina. Kolaborasi ini membuktikan adanya perluasan kapasitas dan koordinasi antar penegak hukum dalam menindaklanjuti kasus di pengadilan dengan diperkuat bukti-bukti valid sekaligus mencegah terjadinya lebih banyak kasus serupa. Meskipun begitu, keberhasilan ini tetap tidak menutup kemungkinan dihalangi oleh praktik tindak korupsi dan keterlibatan pejabat tinggi dalam proses pengadilan.

Kemudian dalam mengukur keberhasilan strategi kemitraan pemerintah secara keseluruhan perlu mempertimbangkan berbagai faktor yang mempengaruhi, yaitu kesadaran masyarakat, peraturan perundang-undangan, laporan transaksi mencurigakan, keamanan berjejaring bagi anak-anak, mekanisme pelayanan perlindungan dan proses tindak lanjut yang berpusat pada penyintas, hingga statistik perkembangan kasus OSAEC per tahunnya. Hal paling utama dalam penekanan kasus OSAEC di Filipina ialah meningkatkan kesadaran masyarakat agar berhenti mengorbankan anak pada pekerjaan terburuk bagi anak, khususnya OSAEC. CWC dan DSWD adalah lembaga yang memainkan peran penting dalam memberikan perlindungan pada anak. CWC dibantu oleh RSCWC yang menjadi bagian dari LCPC, berusaha untuk melakukan penyebaran informasi kepada masyarakat, perumusan rencana program kesejahteraan anak, serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaan dari program-program tersebut. Namun, LCPC dilaporkan tidak cukup sistematis dalam pembagian peran operasional yang saling melengkapi antar lembaga-lembaga anggota. Koordinasi yang rendah dari para pemangku kepentingan, kompleksitas isu OSAEC, kurangnya sumber daya manusia, pendanaan, dan permasalahan hal-hal teknis juga dapat menjadi tantangan yang perlu dikaji kembali dalam pelaksanaan program dan inisiatif yang dikembangkan. Lebih lagi, faktor sosial budaya dan kurangnya partisipasi aktif dari perwakilan anak-anak juga mempengaruhi perilaku masyarakat dalam menanggapi isu OSAEC.

Penelitian ini melihat adanya lonjakan kasus kurang lebih sebesar 260% di tahun 2020. Kemudian di tahun 2022 terdapat fenomena peningkatan akses internet oleh anak-anak sehingga semakin besar juga potensi anak-anak menjadi target kejahatan OSAEC, khususnya dalam konteks pemaksaan memproduksi materi

pelecehan seksual. Di tahun yang sama juga ditemukan adanya lonjakan laporan transaksi mencurigakan terkait OSAEC, tetapi berbanding terbalik dengan jumlah nominal yang justru mengalami penurunan. Kemudian pada tahun 2023, CWC melaporkan bahwa total kasus kekerasan terhadap anak, termasuk OSAEC mengalami penurunan dari tahun sebelumnya. Hal ini justru banyak dipengaruhi oleh kerja sama yang diinisiasi oleh aktor-aktor non-pemerintah, seperti organisasi internasional dan LSM yang lebih memiliki keleluasaan dalam menyentuh hingga ke lapisan masyarakat yang tersebar di berbagai wilayah. Apabila dibandingkan dengan lembaga pemerintah di tingkat lokal, *World Vision* Filipina dan kemitraan SKPH dapat dikatakan lebih berkompeten dalam meningkatkan kesadaran masyarakat dan melibatkan banyak anak-anak terhadap upaya pemberantasan kekerasan pada anak.

Pemerintah Filipina masih menghadapi berbagai tantangan terkait upaya menekan perkembangan kasus OSAEC di negaranya. Beberapa diantaranya, yaitu: (1) Penyebaran lembaga-lembaga perlindungan anak yang tidak tersebar secara merata di seluruh wilayah sehingga menyebabkan sejumlah anak mengalami kesulitan dalam hal pelaporan. (2) Kapasitas SDA yang tidak memadai menjadi hambatan yang signifikan terhadap keberlangsungan penyediaan layanan bantuan penyintas OSAEC. Hal ini ditanggapi dengan pengadaan pelatihan khusus dan pengembangan keterampilan terbatas di daerah-daerah. (3) Permasalahan mekanisme pemberian layanan perlindungan anak di tingkat daerah, khususnya alur pelaporan dan rujukan yang seringkali tidak ditindaklanjuti atau tidak adanya umpan balik yang diterima oleh pihak keluarga terkait kondisi anak maupun perkiraan anak dapat kembali ke lingkungan masyarakat. Dalam menghadapi berbagai tantangan tersebut, pemerintah memerlukan kerja sama dan sistem koordinasi yang lebih komprehensif agar segala informasi terkait keberhasilan maupun kekurangan program dapat dievaluasi bersama sehingga peran operasional dapat lebih sistematis dan efisien.

4. Kesimpulan

OSAEC merupakan fenomena perdagangan manusia modern yang terjadi sebagai akibat dari meningkatnya pengguna akses internet pada anak-anak. OSAEC sangat bertentangan dengan prinsip HAM yang berhubungan dengan penghormatan terhadap harkat dan martabat manusia. Kasus-kasus ini memerlukan penanganan dari berbagai pihak yang memiliki kapabilitas dalam upaya pencegahan, penanganan yang berbasis pada penyintas, penegakan hukum, perlindungan korban dan kelompok rentan, serta kerja sama dan koordinasi baik di tingkat lokal, nasional, maupun internasional. Pemerintah menandatangani *the Implementing Rules and Regulations of Republic Act 11930* dan menyatakan perang terhadap isu OSAEC di Filipina. Fenomena yang terjadi mengalami lonjakan di tahun 2020 dan menunjukkan adanya dinamika tren yang naik turun selama tahun 2020 hingga 2023. Disini mengkonfirmasi bahwa benar pemerintah telah memenuhi standar minimum TVPA dan memiliki kesadaran yang tinggi terhadap urgensi OSAEC, namun faktor-faktor lainnya juga dapat mempengaruhi keberhasilan kerja pemerintah dan mitra-mitranya.

Teori neoliberalisme meyakini bahwa perilaku negara bersifat optimis dalam menghadapi suatu masalah, yaitu dengan menjalin hubungan kerja sama antar negara dan aktor-aktor lainnya. Pemerintah Filipina terlihat cenderung melakukan pola interaksi kerja sama multidisiplin yang berlapis-lapis dalam mencapai

kepentingan bersama. Setiap program yang dilaksanakan diharapkan dapat berorientasi kepada penyintas agar tidak menimbulkan trauma yang semakin parah. Hasilnya, pemerintah berhasil menempati peringkat satu dalam standar minimum TVPA karena upaya-upaya berkelanjutan yang terus dikembangkan dalam memerangi berbagai jenis perdagangan manusia. Keberhasilan strategi kemitraan pemerintah yang paling signifikan adalah di aspek penegakan hukum, tetapi tidak menutup kemungkinan terhambat oleh praktik tindak korupsi dan keterlibatan pejabat tinggi dalam proses pengadilan. Pemerintah telah menyadari urgensi dan kompleksitas isu OSAEC dengan melakukan berbagai kerja sama multidisiplin.

Daftar Pustaka

- America, D. of S. U. S. of. (2021). *TRAFFICKING IN PERSONS REPORT*. Retrieved from <https://www.state.gov/wp-content/uploads/2021/09/TIPR-GPA-upload-07222021.pdf>
- ASEAN. (n.d.). *ASEAN Welcomes Entry into Force of ACTIP*. Retrieved from <https://asean.org/asean-welcomesentry-into-force-of-actip/>
- ASEAN. (2021). *Regional Plan of Action for the Protection of Children from All Forms of Online Exploitation and Abuse in ASEAN*.
- BusinessWorld. (2023). AMLC flags P1.5-billion transactions related to online child sex abuse. Retrieved from <https://www.bworldonline.com/top-stories/2023/07/19/534743/amlc-flags-p1-5-billion-transactions-related-to-online-child-sex-abuse/>
- Cordero, D. (2023). *Letter re: Child Sexual Abuse in the Philippines During the COVID-19 Pandemic*. <https://doi.org/https://doi.org/10.1177%2F00031348231157820>
- ECPAT, INTERPOL, U. (2022). Disrupting Harm in the Philippines: Evidence on online child sexual exploitation and abuse. *Global Partnership to End Violence Against Children*. Retrieved from https://ecpat.org/wp-content/uploads/2022/04/DH_Philippines_ONLINE_FINAL.pdf
- Emzir. (2011). *Metodologi Penelitian Kualitatif Analisis Data*. PT. Rajagrafindo Persada.
- Foundation, W. V. D. (2022). Philippines Impact Report. *World Vision Development Foundation, Inc*. Retrieved from <https://www.worldvision.org.ph/wp-content/uploads/2023/08/Annual-Report-2022.pdf>
- Gullim, H. (2023). *Through the lens of Social Psychology : Online Sexual Abuse and Exploitation among Filipino children amidst the Pandemic*. (December 2022).
- Horizon, C. (2023). *SAFERKIDS PH MID-TERM REVIEW FINAL REPORT*. Retrieved from <https://www.dfat.gov.au/sites/default/files/safer-kids-ph-mtr.docx>
- IJM. (2020). Study reveals dramatic rise in the prevalence of internet-based child sexual exploitation in the Philippines. *IJM*. Retrieved from <https://www.ijm.org/news/study-reveals-dramatic-rise-in-the-prevalence-of-internet-based-child-sexual-exploitation-in-the-philippines>
- IJM. (2022). Philippine Internet Crimes Against Children Center (PICACC) marks its third year with more than 500 rescued. *IJM*. Retrieved from

- <https://www.ijm.org.ph/articles/philippine-internet-crimes-against-children-center-picacc-marks-its-third-year-with-more-than-500-rescued>
- IJM. (2023). Implementing Rules and Regulations of the Anti-OSAEC Law Signed. *IJM*. Retrieved from <https://www.ijm.org.ph/articles/implementing-rules-and-regulations-of-the-anti-osaec-law-signed>
- Institute for Labor Studies (ILS). (2022). Advancing Efforts to Fight Online Sexual Abuse and Exploitation of Children (OSAEC). *Institute for Labor Studies (ILS)*.
- International, E. (2021). *The Sexual Exploitation of Children in Southeast Asia*. Retrieved from https://ecpat.org/wp-content/uploads/2021/05/Regional-Overview_Southeast-Asia.pdf
- Jaya, B. P., Mucharom, R. S., Wibowo, D. E., Aisah, S. N., Sulastri, & Alifvia, N. B. (2023). Criticising the Implementation of the ACTIP in Southeast Asia. *Sriwijaya Law Review*. <https://doi.org/10.28946/slrev.Vol7.Iss2.2542.pp350-367>
- Lab, U. of N. R. (2023). *Legal and institutional responses to the online sexual*. Retrieved from <https://www.nottingham.ac.uk/research/beacons-of-excellence/rights-lab/resources/reports-and-briefings/2023/october/legal-and-institutional-responses-to-the-online-sexual-exploitation-of-children-the-philippines-country-case-study.pdf>
- Meleong, L. J. (2007). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Navallo, M. (2020). Reported child sexual abuse online in PH up by over 260 pct during lockdown: DOJ. *ABS-CBN News*. Retrieved from <https://news.abs-cbn.com/news/05/25/20/reported-child-sexual-abuse-online-in-ph-up-by-over-260-pct-during-lockdown-doj>
- Neuman, W. L. (2016). *Metodologi Penelitian Sosial: Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif*. PT. Indeks.
- Inter-Agency Council Against Trafficking. (2020). *Accomplishment Report: For the Reporting Period: CY 2020*. Retrieved from <https://iacat.gov.ph/wp-content/uploads/2022/02/2020-IACAT-Annual-TIP-Report-2.pdf>
- Philippines, S. (2023). 1 in 100 Filipino children used to produce sexual exploitation material. Retrieved from Sunstar website: https://www.sunstar.com.ph/manila/local-news/1-in-100-filipino-children-used-to-produce-sexual-exploitation-material#google_vignette
- Philippines, U. (2023). UNICEF celebrates signing of the Implementing Rules and Regulations of RA 11930. In *UNICEF Philippines*. Retrieved from <https://www.unicef.org/philippines/press-releases/unicef-celebrates-signing-implementing-rules-and-regulations-ra-11930>
- Report, I. (2023). *Understanding OSAEC Trafficking in the Philippines*. Retrieved from https://justiceandcare.org/app/uploads/2023/11/Understanding-OSEAC-Trafficking-in-the-Philippines-Interim-Report_October-2023.pdf
- Report of ASEAN Regional Conference on Child Online Protection*. (2020). Bangkok.
- Rescue, C. (2022). Philippine Government Declares War on OSEC. *Child Rescue*. Retrieved from <https://www.childrescue.org.nz/blog/philippine-government->

declares-war-on-osec/

Save The Children, P. (2020). *Child Rights Monitoring : Focus on the Philippines*.

Smith, R. K. (2005). *International Human Rights*. Oxford: Oxford University Press.

State, U. D. of. (2022). *2022 Trafficking in Persons Report*. Retrieved from https://www.state.gov/reports/2022-trafficking-in-persons-report/philippines__trashed/

State, U. S. D. of. (2023). *2023 Trafficking in Persons Report: Philippines*. Retrieved from https://www.state.gov/reports/2023-trafficking-in-persons-report/#report-toc__section-4__subsection-2

Trade, A. G. D. of F. A. and. (2021). *DFAT Country Information Report: The Philippines*. Retrieved from <https://www.dfat.gov.au/sites/default/files/country-information-report-philippines.pdf>

Tupas, E. (2024). PNP: Online child sex abuse victims drop by 27 percent. *The Philippines Star*. Retrieved from <https://www.philstar.com/nation/2024/02/04/2330860/pnp-online-child-sex-abuse-victims-drop-27-percent>

UNICEF. (2016). *Child Protection in the Digital Age*. Retrieved from https://www.icmec.org/wp-content/uploads/2016/06/Child_Protection_in_the_Digital_Age.pdf

UNICEF. (2022). *Study on Intervention Strategies for the Rehabilitation and Reintegration of Child Victims / Survivors of Online Sexual Abuse and Exploitation in the Philippines*. Retrieved from <https://www.unicef.org/philippines/media/7136/file/Report.pdf>

USA, D. of S. (2023). *Trafficking in Persons Report*. Retrieved from https://www.state.gov/wp-content/uploads/2023/09/Trafficking-in-Persons-Report-2023_Introduction-V3e.pdf

Vision, W. (2023). Project ACE Philippines and Vietnam conduct regional information sharing with its partners in Da Nang City, Vietnam. *World Vision*. Retrieved from <https://www.worldvision.org.ph/project-ace-philippines-and-vietnam-conduct-regional-information-sharing-with-its-partners-in-da-nang-city-vietnam/>